

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai KIPM Balikpapan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Balikpapan, Juli 2025

Kepala,

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Lampiran dan Daftar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkjmbalikpapan@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai KIPM Balikpapan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Balikpapan, Juli 2025
Kepala,


Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP 19700211 199703 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai KIPM Balikpapan Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp30.108.427,- atau mencapai 7,53 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp400.020.000.-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.252.364.805 atau mencapai 35,54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.337.937.000.-

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp28.048.470.335,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp108.142.011; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp27.940.328.324,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp218.497.150,- dan Rp28.048.470.335.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp9.275.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.739.125.035,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.729.850.035.- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp20.833.427 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.709.016.608.-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp28.261.551.059,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp2.709.016.608,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.277.438.734 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp27.829.973.185.-.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BALAI KIPM BALIKPAPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	TA 2025				TA 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	400,020,000	30,108,427	(80,360,000)	7.53	239,005,000
Jumlah Pendapatan dan Hibah		400,020,000	30,108,427	(80,360,000)	7.53	239,005,000
Belanja	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	3,496,071,000	1,605,826,092	2,952,353,369	45.93	1,974,186,206
Belanja Barang	B.4	2,841,866,000	646,538,713	2,367,387,479	22.75	973,340,482
Belanja Modal	B.5	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		6,337,937,000	2,252,364,805	5,319,740,848	35.54	2,947,526,688

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI KIPM BALIKPAPAN
NERACA
PER 30 Juni 2025 dan Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60,000,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.4	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	48,142,011	53,591,780
JUMLAH ASET LANCAR		108,142,011	53,591,780
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	14,605,968,000	14,605,968,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	7,369,416,763	7,369,416,763
Gedung dan Bangunan	C.2.3	15,427,753,197	15,427,753,197
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	548,332,500	548,332,500
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	53,140,000	53,140,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(10,064,282,136)	(9,780,761,312)
JUMLAH ASET TETAP		27,940,328,324	28,223,849,148
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG			
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.4	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.1	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		28,048,470,335	28,277,440,928
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.5	60,000,000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	122,622,262	15,889,869
Utang yang Belum ditagihkan	C.5.2	35,874,888	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		218,497,150	15,889,869
JUMLAH KEWAJIBAN		218,497,150	15,889,869
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	27,829,973,185	28,261,551,059
JUMLAH EKUITAS		27,829,973,185	28,261,551,059
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		28,048,470,335	28,277,440,928

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL**BALAI KIPM BALIKPAPAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 2024***(Dalam Rupiah)*

Uraian	Cat.	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9,275,000	239,005,000
JUMLAH PENDAPATAN		9,275,000	239,005,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,698,072,354	2,070,088,089
Beban Persediaan	D.3	63,449,773	75,570,647
Beban Barang dan Jasa	D.4	588,682,776	767,521,665
Beban Pemeliharaan	D.5	59,064,492	195,826,319
Beban Perjalanan Dinas	D.6	46,334,816	144,073,312
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	283,520,824	418,323,452
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2,739,125,035	3,671,403,484
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,729,850,035)	(3,432,398,484)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		20,833,427	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	20,833,427	(44,737,080)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,709,016,608)	(3,477,135,564)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(2,709,016,608)	(3,477,135,564)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI KIPM BALIKPAPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	28,261,551,059	29,788,377,666
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,709,016,608)	(3,477,135,564)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2,277,438,734	2,719,913,063
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(431,577,874)	(757,222,501)
EKUITAS AKHIR	E.6	27,829,973,185	29,031,155,165

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Balikpapan

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan merupakan salah satu UPT dari Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di daerah yang terletak di Jalan Kolonel Syarifuddin Yoes No.10 Balikpapan Kalimantan Timur

Rencana Strategis Balai KIPM Balikpapan :

Terdiri dari 1 visi, 1 misi, 3 tujuan dan 4 sasaran antara lain: Visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah untuk memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan hasil kelautan dan perikanan.

Visi BPPMHKP adalah:

- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan

Misi BPPMHKP adalah:

- Menjamin mutu hasil kelautan dan perikanan

Menjadi otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Balikpapan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Balai KIPM Balikpapan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan

Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Balikpapan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Balikpapan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Balikpapan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2024 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Terdapat Kewajiban Jangka Pendek Sebesar Rp220.943.198,- berupa Utang Kepada Pihak Ketiga Sebesar Rp149.534.358,- yang terdiri dari Gaji PPNPN sebesar Rp50.084.475,-, Gaji PPPK sebesar Rp3.990.381,-, Gaji Induk Pegawai sebesar Rp91.911.502,-, Lembur PPNPN sebesar Rp3.548.000,-, sedangkan Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp11.408.840,- berupa tagihan bendahara yang belum di realisasikan dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp60.000.000,-

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Balai KIPM Balikpapan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.728.082.000. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *peralihan anggaran ke Badan Karantina Indonesia*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	400.020.000	400.020.000
Jumlah Pendapatan	379.515.000	379.515.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.496.071.000	3.496.071.000
Belanja Barang	2.841.866.000	2.841.866.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	6.337.937.000	6.337.937.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp30.108.427

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp30.108.427,- atau mencapai 7,53 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp400.020.000. Pendapatan Satuan Kerja Balai KIPM Balikpapan terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya dan Pendapatan Penjualan Perlatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	400.020.000	9.275.000	2,32
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20.833.427	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	400.020.000	30.108.427	7,53

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas Pengujian dan Sertifikasi pada Balai KIPM Balikpapan. Selain itu, terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Tidak Terdapat pendapatan lain-lain pada Balai KIPM Balikpapan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	9.275.000	207.805.000	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	31.200.000	
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	20.833.427	0	
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	30.108.427	239.005.000	

Realisasi Belanja
Rp2.252.364.805,
-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai KIPM Balikpapan pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.252.364.805,- atau 35,54% dari anggaran belanja sebesar Rp6.337.937.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.496.071.000	1.605.826.092	45,93
Belanja Barang	2.841.866.000	646.538.713	22,75
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	6.337.937.000	2.252.364.805	35,54
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	6.337.937.000	2.252.364.805	35,54

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Pengurangan Belanja Barang berupa perjalanan Dinas.
2. Tidak adanya anggaran dan realisasi pada belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	1.605.826.092	1.974.186.206	1,50
Belanja Barang	646.538.713	973.340.482	21,24
Belanja Modal	-	-	63,63
Belanja Bantuan Sosial	-	-	42,86
Jumlah	2.252.364.805	2.947.526.688	40,25

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp1.605.826.092*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.605.826.092,- dan Rp1.974.186.206. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai Mutasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.532.216.092	1.892.347.666	
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	73.610000	81.839.000	
Jumlah Belanja Kotor	1.605.826.092	1.974.186.666	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	460	
Jumlah Belanja	1.605.826.092	1.974186.206	

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp646.538.713,-

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp646.538.713,- dan Rp973.340.482,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Adanya Pengurangan Belanja Barang berupa perjalanan Dinas,
2. Penurunan Belanja Jasa langganan listrik dan air yang disebabkan efisiensi dan menurunnya aktivitas pelayanan,

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	401.926.719	425.424.262	
Belanja Barang Non Operasional	3.400.000	2.265.500	
Belanja Persediaan	13.479.650	39.168.904	
Belanja Jasa	144.343.288	286.686.805	
Belanja Pemeliharaan	38.254.240	82.220.839	

Belanja Perjalanan Dinas	45.134.816	137.574.172	
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	646.538.713	973.340.482	
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
Jumlah Belanja	646.538.713	973.340.482	-

Belanja
Rp0,-

Modal

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tidak adanya anggaran belanja modal TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja
Tanah Rp0

Modal

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp0,- mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp82.031.291,- Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung layanan perkantoran lebih kecil dari sebelumnya.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Komputer Unit			
A.C Split			
Meja dan Kursi			
Jumlah Belanja Kotor	-	-	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Renovasi Gedung Kantor	-	-	-

Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	-	-	-

Aset Lancar
Rp108.142.011,-

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp108.142.011,- dan Rp53.591.780.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai		0
Bank BRI	60.000.000	0
Jumlah	60.000.000	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan
Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNB		
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			
	Jumlah	-	-

*Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			
	Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-	-

Beban Dibayar di Muka
R0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan Desember
2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima
TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp48.142.011,-

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp48.142.011,- dan Rp53.591.780,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	32.887.875	41.898.849
Bahan untuk Pemeliharaan	3.250.100	14.666.016
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	12.004.036	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	48.142.011	53.591.780

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp27.940.328.324,-

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp27.940.328.324,- dan Rp28.223.849.148.-

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai KIPM Balikpapan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp14.605.968.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.605.968.000,- dan Rp14.605.968.000,- Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	14.605.968.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Juni 2025	14.605.968.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	14.605.968.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Tanah TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	600 m2	Jl.Kol.Syarifudin Yoes	3.013.200.000
2	550 m2	Jl.Kol.Syarifudin Yoes	3.199.350.000
3	550 m2	Jl.Kol.Syarifudin Yoes	3.199.350.000
4	2.692 m2	Samarinda	5.194.068.000
Jumlah			14.857.411.000

Peralatan dan Mesin

Rp7.369.416.763,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.369.416.763,- dan Rp7.369.416.763,- Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	7.369.416.763
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Saldo Per 30 Juni 2025	7.369.416.763
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	7.041.420.981
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	327.995.782

Gedung dan Bangunan
Rp15.427.753.197

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp15.427.753.197,- dan Rp15.427.753.197,-.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	15.427.753.197
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 30 Juni 2025	15.427.753.197
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	2.321.512.428
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	13.106.240.769

Tidak Terdapat Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Balikpapan

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp548.332.500

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp548.332.500 dan Rp548.332.500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	548.332.500
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo Per 30 Juni 2025	548.332.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	417.827.903
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	130.504.597

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp53.140.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp53.140.000 dan Rp53.140.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	53.140.000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 30 Juni 2025	53.140.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	53.140.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,-

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan Perencanaan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja pada Wilker Berau yang hingga saat ini belum dilanjutkan terkait pemblokiran anggaran pembangunan gedung.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp10.064.282.136,-

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.064.282.136,- dan Rp9.780.761.312,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025.

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.369.416.763	7.125.019.540	244.397.223
2.	Gedung dan Bangunan	15.427.753.197	2.488.592.547	12.939.160.650
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.332.500	450.670.049	97.662.451
4.	Aset Tetap Lainnya	53.140.000	-	53.140.000
	Jumlah	28.223.849.148	10.064.282.136	13.334.360.324

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Balai KIPM Balikpapan merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
6.	-		
	Jumlah		

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Piutang TPA TA 2025 dan Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2024
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
	Jumlah		

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 20
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang TA 2025

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		
Tagihan TPA			
Lancar	-		
Kurang Lancar	-		
Diragukan	-		
Macet	-		
Jumlah	-		
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		

Aset Lainnya

Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai KIPM Balikpapan terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai KIPM Balikpapan berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel 21
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Saldo Per 30 Juni 2025	-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	

Nilai Buku Per 30 Juni 2025	-
------------------------------------	---

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
	Jumlah	-

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai KIPM Balikpapan. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo Per 30 Juni 2025	-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	-

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2025
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	<i>Software</i>			

Jumlah				
B.	Aset Lain-lain			
Jumlah				
Total		-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp218.497.150,-

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai KIPM Balikpapan per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp218.497.150,- dan Rp15.889.869.-

Uang Muka dari KPPN

Rp60.000.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak

Ketiga Rp122.622.262,-

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 masing-masing sebesar Rp122.622.262,- dan Rp15.889.869.- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai KIPM Balikpapan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	122.622.262
Total		122.622.262

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan Tukin dan Uang Makan Pegawai yang belum dibayarkan kepada para pegawai Balai KIPM Balikpapan per tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	
-	
-	
Jumlah	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan Desember 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas
Rp27.829.973.185,-

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.829.973.185,- dan Rp28.261.551.059,-. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNB
Rp9.275.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp9.275.000,- dan Rp239.005.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	9.275.000	239.005.000	
Pendapatan Pendidikan	-	-	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	9.275.000	239.005.000	

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya serta Pendapatan Jasa Karantina Perikanan.

*Beban Pegawai
Rp1.698.072.354,
-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.698.072.354,- dan Rp2.070.088.089,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2025 dan 2024

dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji	717.953.226	924.627.816	
Beban Tunjangan-tunjangan	906.509.128	1.063.621.273	
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	73.610.000	81.839.000	

Jumlah Beban	1.698.072.354	2.070.088.089	
---------------------	----------------------	----------------------	--

Beban Persediaan
Rp63.449.773,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp63.449.773,- dan Rp75.570.647,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	34.309.773	68.897.422	
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	29.140.000	6.673.225	
Jumlah Beban	63.449.773	75.570.647	

Beban Barang dan Jasa
Rp588.682.776,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp588.682.776,- dan Rp767.521.665,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	384.551.414	394.672.817	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.669.000	9.709.000	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	231.100	1.099.900	
Beban Honor Operasional Satker	39.300.000	27.398.000	
Beban Bahan	14.768.400	225.500	
Beban Langganan Listrik	48.323.222	80.960.005	

Beban Langganan Telepon	488.990	461.240	
Beban Sewa	49.000.000	102.466.667	
Beban Langganan Air	3.466.490	3.875.463	
Beban Jasa Lainnya	29.825.000	125.725.073	
Beban Honor output Kegiatan	3.400.000	2.040.000	
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	-	
Beban Barang Operasional Lainnya	8.119.160	18.888.000	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	
Jumlah Beban	588.682.776	767.521.665	

Beban Pemeliharaan Rp59.064.492,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp59.064.492,- dan Rp195.826.319,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.422.990	101.289.400	

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.621.250	83.060.839	
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	12.020.252	9.826.080	
Beban Persediaan suku cadang	-	1.650.000	
Jumlah Beban	59.064.492	195.826.319	

Beban Perjalanan Dinas
Rp46.334.816,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp46.334.816,- dan Rp144.073.312,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	11.767.332	122.014.357	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000	8.230.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33.547.484	13.828.955	
Jumlah Beban	46.334.816	144.073.312	

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan

pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial - dalam bentuk Uang	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp283.520.824.-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp283.520.824,- dan Rp418.323.452,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.598.559	215.860.515	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	167.080.119	169.620.791	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.842.146	32.842.146	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Penyusutan	283.520.824	418.323.452	
Beban Amortisasi Software	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	
Jumlah Amortisasi	-	-	
Jumlah Beban	283.520.824	418.323.452	

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	-	-	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Penjualan Alat Kantor	-	-	
Selisih Kurs	-	-	
Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	
Jumlah Beban	-	-	

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp28.261.551.059,-

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.261.551.059,- dan Rp29.788.377.666,-

Defisit LO
Rp2.709.016.608,-

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp2.709.016.608,- dan Rp3.477.135.564,- Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.277.438.734,
-

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.277.438.734,- dan Rp2.719.913.063,-

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 31

Transaksi Antar Entitas TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(30.108.427)
Ditagikan ke Entitas Lain	2.252.364.805
Transfer Masuk	55.301.206
Transfer Keluar	(118.850)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-

Jumlah	2.277.438.734
---------------	----------------------

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp30.108.427 sedangkan DKEL sebesar Rp2.252.364.805.-

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp55.301.206 dan Transfer Keluar sebesar Rp118.850,- terdiri dari:

Tabel 32
Transfer Masuk TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Health Certificate	Sekretariat Badan	55.301.206
2.			
Jumlah			55.301.206

Terdapat Transfer Keluar berupa Health Certificate ke BKIPM Banjarmasin sebesar Rp118.850,- sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Pengesahan Hibah Langsung TA 2025

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	-
2.	-	-	-
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp27.829.973.185,-

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp27.829.973.185,- dan Rp29.031.155.165,-

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat Kejadian-kejadian Penting setelah tanggal Neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

- Program Prioritas Nasional tahun 2025 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan lingkup BPPMKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp380.000.000,- dan realisasi sebesar Rp39.787.332,- dengan rincian disajikan pada tabel realisasi anggaran belanja kegiatan Prioritas Nasional (PN) satker Balai KIPM Balikpapan per 30 juni 2025, terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum terealisasi anggarannya.

Tabel 34
Program Prioritas Nasional TA.2025

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
3989.PDC-Sertifikasi Produk	110.000.000	12.787.332	11,62
3989.PDF-Sertifikasi Lembaga	95.000.000	0	0
3989.QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	15.000.000	0	0
7010.PBR-Kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan	80.000.000	3.000.000	3,75
7010.PDD-Standarisasi Lembaga	25.000.000	0	0
7010.PDD-Standarisasi Lembaga	45.000.000	24.000.000	53,33
7010.QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	10.000.000	0	0
Total	380.000.000	39.787.332	

- Capaian Realisasi Kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI KINERJA
Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-08
Kementerian Negara/Lembaga : 032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Eselon I : 022.19 - BAKHAP PENGENDALIAN DAN PENYAWANAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Wilayah/Provinsi : 16.02 - KOTA BALIKPAPAN/KALAMANTAN TIMUR
Satuan Kerja : SEF10 - BALAI KARANTENA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 16-07-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
04	ECONOM	6,337,887,000.00	2,292,364,860.00	36.18%							
08	PERTANJANG, KESYAHBASAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	6,337,887,000.00	2,292,364,860.00	36.18%							
0C	Program Mita Tambak dan Doga Sangkai	400,000,000.00	30,797,320.00	7.70%							
080	Pengembangan dan Pengembangan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	200,000,000.00	12,797,320.00	6.39%							
08A	Pengembangan dan Pengembangan Produk	5,000,000.00	0.00	0%							
081	Produk perikanan yang diolah dan diolah menjadi produk perikanan	5,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Produk	0.0000	0%	0%	(00)	
08C	Sertifikasi Produk	10,000,000.00	12,797,320.00	127.97%							
082	Produk ikan dan perikanan hasil perikanan yang diolah	10,000,000.00	12,797,320.00	127.97%	0.0000	Produk	12.0000	30%	0.00%	(01) Akumulasi dan optimisasi anggaran	
08F	Sertifikasi Lembaga	35,000,000.00	0.00	0%							
083	Lembara ikan dan perikanan hasil perikanan yang diolah	40,000,000.00	0.00	0%	0.0000	Lembara	4.0000	30%	0%	(01) Akumulasi dan optimisasi anggaran	
08C	Pengembangan dan Pengembangan Lembaga	15,000,000.00	0.00	0%							
082	UPT yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan mutu hasil perikanan	15,000,000.00	0.00	0%	7.0000	Lembara	0.0000	0%	0%	(00)	

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
010	Manajemen Mutu	175,000,000.00	27,000,000.00	15.43%							
080	Kegiatan Bidang Perikanan dan Perikanan	5,000,000.00	0.00	0%							
081	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Mutu Hasil Perikanan	5,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Kelembagaan Kegiatan	0.0000	0%	0%	(00)	
08C	Peraturan Bidang Perikanan dan Perikanan	10,000,000.00	0.00	0%							
081	Beberapa jenis perikanan yang diolah menjadi produk perikanan	10,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Kegiatan	0.0000	0%	0%	(00)	
080	Kegiatan Bidang Perikanan dan Perikanan	80,000,000.00	3,000,000.00	3.75%							
081	Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Mutu Hasil Perikanan	80,000,000.00	3,000,000.00	3.75%	1.0000	Kelembagaan Kegiatan	0.0000	0%	1.25%	(00)	
082	Standarisasi Lembaga	70,000,000.00	24,000,000.00	34.29%							
081	Salah satu jenis perikanan yang diolah menjadi produk perikanan	25,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembara	0.0000	0%	0%	(00)	
082	Unit kerja yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan mutu hasil perikanan	45,000,000.00	24,000,000.00	53.33%	1.0000	Lembara	1.0000	30%	88.67%	(01) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun penganggaran belum selesai dalam proses	
08A	Pengembangan dan Pengembangan Produk	10,000,000.00	0.00	0%							
081	Unit kerja perikanan yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan mutu hasil perikanan	10,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Produk	0.0000	0%	0%	(00)	
08A	Program Kelola Mutu	5,937,887,000.00	2,310,577,470.00	37.23%							
080F	Manajemen Mutu Hasil Perikanan dan Perikanan	5,937,887,000.00	2,310,577,470.00	37.23%							
08A	Layanan Kelola Mutu	5,935,942,000.00	2,310,577,470.00	37.8%							
082	Layanan Umum	114,425,000.00	32,345,484.00	28.27%	1.0000	Layanan	0.0000	28.27%	0%	(00)	

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
004	Layanan Perikanan	5,736,007,000.00	2,188,229,980.00	37.99%	1.0000	Layanan	0.0000	0%	0.00%	(00)	
080	Layanan Manajemen Kinerja Internal	84,425,000.00	0.00	0%							
082	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50,895,000.00	0.00	0%	1.0000	Dibayarkan	0.0000	0%	0%	(00)	
080	Layanan Manajemen Keuangan	24,775,000.00	0.00	0%	1.0000	Dibayarkan	0.0000	0%	0%	(00)	

- Berdasarkan Keputusan Kepala Balai KIPM Balikpapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.001/06.0/KU.110/I/2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Balai KIPM Balikpapan sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Raflina Hermawan, A.Pi
 Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM: Armansyah Arianto Brachman, S.E
 Bendahara Pengeluaran : Siti Hadijah

Lampiran – lampiran

Neraca

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0	60,000,000	0.00
Persediaan	48,142,011	53,591,780	(5,449,769)	(10.17)
JUMLAH ASET LANCAR	108,142,011	53,591,780	54,550,231	101.79
ASET TETAP				
Tanah	14,605,968,000	14,605,968,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,369,416,763	7,369,416,763	0	0.00
Gedung dan Bangunan	15,427,753,197	15,427,753,197	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	548,332,500	548,332,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	53,140,000	53,140,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,064,282,136)	(9,780,761,312)	(283,520,824)	2.90
JUMLAH ASET TETAP	27,940,328,324	28,223,849,148	(283,520,824)	(1.00)
JUMLAH ASET	28,048,470,335	28,277,440,928	(228,970,593)	(0.81)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	122,622,262	15,889,869	106,732,393	671.70
Utang Yang Belum Ditagihkan	35,874,888	0	35,874,888	0.00
Uang Muka dari KPPN	60,000,000	0	60,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	218,497,150	15,889,869	202,607,281	1,275.07
JUMLAH KEWAJIBAN	218,497,150	15,889,869	202,607,281	1,275.07
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	27,829,973,185	28,261,551,059	(431,577,874)	(1.53)
JUMLAH EKUITAS	27,829,973,185	28,261,551,059	(431,577,874)	(1.53)
JUMLAH EKUITAS	27,829,973,185	28,261,551,059	(431,577,874)	(1.53)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	28,048,470,335	28,277,440,928	(228,970,593)	(0.81)

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

NIP. 197002111997031003

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 032
UAKPB : 567610

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl.Data : 22/07/25 6:27 AM
Tgl.Cetak : 22/07/25 9:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	32,887,875
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,250,100
117131	Bahan Baku	12,004,036
131111	Tanah	14,605,968,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,369,416,763
133111	Gedung dan Bangunan	15,427,753,197
134111	Jalan dan Jembatan	160,651,000
134112	Irigasi	387,681,500
135121	Aset Tetap Lainnya	53,140,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,125,019,540)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,488,592,547)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(114,486,445)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(336,183,604)
J U M L A H		27,988,470,335

Neraca Percobaan

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	32,887,875	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,250,100	0
0.0	117131	Bahan Baku	12,004,036	0
0.0	131111	Tanah	14,605,968,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,369,416,763	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,427,753,197	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	160,651,000	0
0.0	134112	Irigasi	387,681,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	53,140,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,125,019,540
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,488,592,547
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	114,486,445
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	336,183,604
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	92,246,262
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	30,376,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	35,874,888
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,252,364,805
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	30,108,427	0
0.0	313211	Transfer Keluar	118,850	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	55,301,206
0.0	391111	Ekuitas	0	28,261,551,059
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20,833,427
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	9,275,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	631,066,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,610	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48,581,890	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,185,898	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,060,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	27,740,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,011,263	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	34,254,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	54,679,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,685,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	28,832,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	298	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,883,240	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:29 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,153,296	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,607,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	3,367,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1,665,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	68,126,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	5,484,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	695,341,271	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	32,340,488	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	384,551,414	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6,669,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	231,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39,300,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,119,160	0
3.0	521211	Beban Bahan	14,768,400	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	540,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	48,323,222	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	488,990	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,466,490	0
3.0	522141	Beban Sewa	49,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	29,825,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,422,990	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43,621,250	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	11,767,332	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,020,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33,547,484	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83,598,559	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	167,080,119	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8,092,277	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	24,749,869	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	34,309,773	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12,020,252	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	29,140,000	0
JUMLAH			40,882,104,783	40,882,104,783

Keterangan :
FINAL

Balikpapan, 22 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA




Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP 197002111997031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:29 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,252,364,805
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	30,108,427	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20,833,427
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	9,275,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	561,411,220	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6,808	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,208,090	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,399,316	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18,720,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	24,160,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,874,547	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,488,820	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	54,679,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,205,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	25,628,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	260	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,562,880	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,025,152	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,317,440	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,367,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,480,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	68,126,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	5,484,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	695,341,271	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	32,340,488	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	347,607,459	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,669,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	231,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39,300,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,119,160	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,400,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,479,650	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	61,000,793	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	488,990	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,028,505	0
3.0	522141	Belanja Sewa	49,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	29,825,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,422,990	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:29 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,831,250	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,767,332	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,020,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32,347,484	0
JUMLAH			2,282,473,232	2,282,473,232

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

197002111997031003

Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN 567610

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM
Tgl Cetak : 22/07/25 9:28 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,337,937,000	2,252,364,805	(4,085,572,195)	35.54	6,416,500,000	2,947,526,688	(3,468,973,312)	45.94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 22 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP 197002111997031003

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 567610
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TIMUR
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/25 9:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/7/25 8:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	955,256,000	955,256,000	561,411,220	0	561,411,220	58.77	393,844,780
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	20,000	6,808	0	6,808	34.04	13,192
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	98,000,000	98,000,000	43,208,090	0	43,208,090	44.09	54,791,910
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33,000,000	33,000,000	14,399,316	0	14,399,316	43.63	18,600,684
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,180,000	36,180,000	18,720,000	0	18,720,000	51.74	17,460,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	98,825,000	50,000,000	24,160,000	0	24,160,000	48.32	25,840,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,000,000	10,000,000	8,874,547	0	8,874,547	88.75	1,125,453
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	72,276,000	72,276,000	30,488,820	0	30,488,820	42.18	41,787,180
511129	Belanja Uang Makan PNS	207,768,000	207,768,000	54,679,000	0	54,679,000	26.32	153,089,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,550,000	26,000,000	12,205,000	0	12,205,000	46.94	13,795,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,516,875,000	1,488,500,000	768,152,801	0	768,152,801	51.61	720,347,199
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	38,444,000	47,064,000	25,628,800	0	25,628,800	54.46	21,435,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	6,000	260	0	260	4.33	5,740
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,845,000	4,486,000	2,562,880	0	2,562,880	57.13	1,923,120
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,560,000	1,800,000	1,025,152	0	1,025,152	56.95	774,848
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,700,000	4,100,000	2,317,440	0	2,317,440	56.52	1,782,560
511628	Belanja Uang Makan PPPK	10,257,000	9,842,000	3,367,000	0	3,367,000	34.21	6,475,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,220,000	2,590,000	1,480,000	0	1,480,000	57.14	1,110,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	59,032,000	69,888,000	36,381,532	0	36,381,532	52.06	33,506,468
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	193,653,000	193,653,000	68,126,000	0	68,126,000	35.18	125,527,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	6,648,000	14,167,000	5,484,000	0	5,484,000	38.71	8,683,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	200,301,000	207,820,000	73,610,000	0	73,610,000	35.42	134,210,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,664,711,000	1,664,711,000	695,341,271	0	695,341,271	41.77	969,369,729
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	55,152,000	65,152,000	32,340,488	0	32,340,488	49.64	32,811,512
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,719,863,000	1,729,863,000	727,681,759	0	727,681,759	42.07	1,002,181,241
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,496,071,000	3,496,071,000	1,605,826,092	0	1,605,826,092	45.93	1,890,244,908
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	992,711,000	1,007,913,000	347,607,459	0	347,607,459	34.49	660,305,541

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 567610
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TIMUR
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/25 9:29 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/7/25 8:14 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	50,160,000	50,160,000	6,669,000	0	6,669,000	13.3	43,491,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,444,000	12,444,000	231,100	0	231,100	1.86	12,212,900
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	94,320,000	94,320,000	39,300,000	0	39,300,000	41.67	55,020,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	83,920,000	98,189,000	8,119,160	0	8,119,160	8.27	90,069,840
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,233,555,000	1,263,026,000	401,926,719	0	401,926,719	31.82	861,099,281
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	27,020,000	27,020,000	0	0	0	0	27,020,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	3,400,000	0	3,400,000	41.67	4,760,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	36,180,000	36,480,000	3,400,000	0	3,400,000	9.32	33,080,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	129,271,000	132,271,000	13,479,650	0	13,479,650	10.19	118,791,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	129,271,000	132,271,000	13,479,650	0	13,479,650	10.19	118,791,350
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	216,000,000	179,652,000	61,000,793	0	61,000,793	33.95	118,651,207
522112	Belanja Langganan Telepon	2,400,000	2,400,000	488,990	0	488,990	20.37	1,911,010
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	18,000,000	4,028,505	0	4,028,505	22.38	13,971,495
522141	Belanja Sewa	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0	49,000,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	146,172,000	145,870,000	29,825,000	0	29,825,000	20.45	116,045,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	431,572,000	394,922,000	144,343,288	0	144,343,288	36.55	250,578,712
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252,128,000	247,626,000	3,422,990	0	3,422,990	1.38	244,203,010
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311,330,000	319,711,000	34,831,250	0	34,831,250	10.89	284,879,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	563,458,000	567,337,000	38,254,240	0	38,254,240	6.74	529,082,760
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	257,971,000	257,971,000	11,767,332	0	11,767,332	4.56	246,203,668
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,390,000	11,390,000	1,020,000	0	1,020,000	8.96	10,370,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	169,469,000	169,469,000	32,347,484	0	32,347,484	19.09	137,121,516
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	447,830,000	447,830,000	45,134,816	0	45,134,816	10.08	402,695,184
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,841,866,000	2,841,866,000	646,538,713	0	646,538,713	22.75	2,195,327,287
	JUMLAH BELANJA	6,337,937,000	6,337,937,000	2,252,364,805	0	2,252,364,805	35.54	4,085,572,195

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:28 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,275,000	239,005,000	(229,730,000)	(96.119)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	9,275,000	239,005,000	(229,730,000)	(96.119)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	9,275,000	239,005,000	(229,730,000)	(96.119)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,698,072,354	2,070,088,089	(372,015,735)	(17.971)
Beban Persediaan	63,449,773	75,570,647	(12,120,874)	(16.039)
Beban Barang dan Jasa	588,682,776	767,521,665	(178,838,889)	(23.301)
Beban Pemeliharaan	59,064,492	195,826,319	(136,761,827)	(69.838)
Beban Perjalanan Dinas	46,334,816	144,073,312	(97,738,496)	(67.839)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 7:05 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:28 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	283,520,824	418,323,452	(134,802,628)	(32.224)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,739,125,035	3,671,403,484	(932,278,449)	(25.393)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,729,850,035)	(3,432,398,484)	702,548,449	(20.468)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	20,833,427	0	20,833,427	
Pendapatan Pelepasan Aset	20,833,427	0	20,833,427	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(44,737,080)	44,737,080	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	44,737,080	(44,737,080)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	20,833,427	(44,737,080)	65,570,507	(146.569)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,709,016,608)	(3,477,135,564)	768,118,956	(22.091)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,709,016,608)	(3,477,135,564)	768,118,956	(22.091)

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA




Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
KIP 197002111997031003

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (567610) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Tgl Data : 22/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 22/07/25 9:28 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	28,261,551,059	29,788,377,666	(1,526,826,607)	(5.13)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,709,016,608)	(3,477,135,564)	768,118,956	(22.09)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,277,438,734	2,719,913,063	(442,474,329)	(16.27)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(431,577,874)	(757,222,501)	325,644,627	(43.01)
EKUITAS AKHIR	27,829,973,185	29,031,155,165	(1,201,181,980)	(4.14)

Keterangan :

FINAL

Balikpapan, 22 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP 197002111997031003

Laporan Realisasi
Pendapatan Negara dan
Hibah

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 567610

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN TIMUR
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/07/25 9:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	20,833,427	0	20,833,427	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	20,833,427	0	20,833,427	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	400,020,000	9,275,000	0	9,275,000	2.32
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	400,020,000	9,275,000	0	9,275,000	2.32
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	400,020,000	30,108,427	0	30,108,427	7.53
	JUMLAH PENDAPATAN	400,020,000	30,108,427	0	30,108,427	7.53